



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA,
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2020 – 2021.
Masa Sidang ke-	: III (Tiga).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Kerja (Fisik dan Virtual)
Dengan	: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI.
Hari/Tanggal	: Kamis, 14 Januari 2021
Pukul	: 14.00 WIB – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI, dan secara virtual menggunakan Zoom
Pimpinan Rapat	: Syaiful Huda/Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Perkenalan Menparekraf/Kepala Baparekraf RI yang baru 2. Penyampaian Program-Program Unggulan Kemenparekraf/ Baparekraf RI 3. Lain-lain
Hadir Komisi X DPR RI	: 46 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: Sandiaga Salahuddin Uno (Menparekraf/Kepala Baparekraf RI) beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 14.21 WIB oleh **Syaiful Huda/Ketua Komisi X DPR RI**, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Baparekraf RI serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.


II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

1. Komisi X DPR RI mengapresiasi paparan dan penjelasan Menparekraf/Kepala Baparekraf RI yang telah melakukan pengenalan dan menyampaikan 3 (tiga) Platform Program, strategi program pengembangan Desa Wisata, serta program-program unggulan tahun 2021.
2. Komisi X DPR RI mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI agar 3 (tiga) Platform Program dalam bentuk Inovasi, Adaptasi dan Kolaborasi, dapat diwujudkan secara optimal dalam bentuk program dan kegiatan untuk memajukan dan mengembangkan sektor pariwisata serta ekonomi kreatif, khususnya di tengah pandemi Covid-19.
3. Komisi X DPR RI mendukung strategi program pengembangan Desa Wisata Tahun 2021-2024, khususnya dalam hal kerjasama dengan K/L terkait, perguruan tinggi, komunitas (dalam dan luar negeri), dan organisasi/lembaga parekraf, dengan tetap dilakukan monitoring dan evaluasi secara intensif.
4. Komisi X DPR RI mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk melakukan kajian secara komprehensif (perencanaan sampai implementasi) mengenai program-program unggulan yang telah disampaikan, dengan memperhatikan dan menekankan peraturan perundang-undangan, implementasi yang terukur, serta dampak positif bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif.
5. Komisi X DPR RI mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk menyelesaikan atau mengkoordinasikan beberapa hal krusial bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, antara lain; data besar (*Big Data*) Parekraf, SDM Parekraf di daerah, tata kelola kelembagaan pariwisata (antara lain: Pendidikan pariwisata dan Badan Otorita), mewujudkan ekosistem ekonomi kreatif, dan penerapan Kebersihan, Kesehatan, Keamanan dan Kelestarian Lingkungan (K4 atau CHSE).
6. Komisi X DPR RI menekankan kembali agar pengembangan lima destinasi superprioritas tidak mengabaikan pengembangan destinasi pariwisata potensial di daerah, termasuk eko-wisata dan destinasi wisata sejarah.
7. Komisi X DPR RI mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk mengkoordinasikan dan memastikan anggaran yang terkait pariwisata di K/L lainnya, dapat digunakan untuk pengembangan pariwisata.
8. Komisi X DPR RI mengharapkan Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk memberikan penjelasan dalam raker yang akan datang, antara lain mengenai:
 - a. Dengan adanya dukungan alokasi anggaran pada 5 destinasi superprioritas dan 5 destinasi prioritas, agar dihitung potensi pendapatan negara dan potensi dampak terhadap masyarakat.
 - b. Simulasi dampak pertumbuhan ekonomi jika desa wisata mendapatkan dukungan dan alokasi anggaran yang sama dengan anggaran yang diberikan kepada 5 destinasi superprioritas dan 5 destinasi prioritas.
 - c. Guna memberikan kepastian perkembangan desa wisata, Kemenparekraf/Baparekraf RI diharapkan memberikan data rincian jumlah desa wisata (eksisting) dengan kategori rintisan, berkembang, maju dan mandiri, serta pendampingan yang dilakukan K/L lainnya.
9. Komisi X DPR RI meminta Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk memberikan jawaban tertulis terhadap pertanyaan anggota yang belum terjawab, paling lambat tanggal 25 Januari 2021.

III. PENUTUP


Rapat ditutup pada pukul 19.55 WIB

**MENPAREKRAF/
KEPALA BAPAREKRAF RI,**



Sandiaga Sa'ahuddin Uno

KETUA RAPAT,



Syaiful Huda